

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
1	Mardiyono dan Prasetya (2012)	Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (Studi Kasus pada PPP Tamperan Kab. Pacitan)	metode kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi	adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembangunan PPP Tamperan memberikan dampak perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir sekitar. Dampak perubahan yang dialami oleh masyarakat pesisir sekitar adalah adanya perubahan fisik sarana dan prasarana pelabuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang lain adalah dengan adanya penyerapan tenaga kerja dari usaha masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan bila dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tersebut.
2	Setyawati dan Suryahani (2013)	Evaluasi Dampak Pembangunan Sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Purbalingga	Tipe penelitian evaluasi kebijakan retrospektif melalui interview dan FGD	PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2003 meningkat sekitar 1,3%. Di sisi lain, kesenjangan antarsektor cukup rendah. Artinya masing-masing sektor bekerja lebih baik dan relatif akan tersebar merata, sehingga kebijakan alokasi anggaran lebih baik diarahkan memiliki

				keterkaitan (ke belakang dan ke depan) untuk semua sektor
3	Maharani (2021)	Dampak Pembangunan Destinasi Wisata Mloko Sewu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pupus Kecamatan Ngebel	metode kualitatif deskriptif	Pengelolaan wisata Mloko Sewu seluruhnya dikelola oleh pihak pengelola Mloko Sewu tanpa keterlibatan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Akibat pembangunan destinasi wisata Mloko Sewu di Desa Pupus untuk warga antara lain pergantian mutu hidup masyarakat, peningkatan kedudukan pengelola Mloko Sewu dalam kehidupan sosial masyarakat, peningkatan pemasukan warga yang membuka usaha di dekat wisata Mloko Sewu, terciptanya peluang kerja dan dapat menimbulkan potensi penyimpangan sosial.
4	Ompusunggu (2018)	Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo	penelitian kualitatif dengan metode deskriptif	terdapat beberapa dampak positif diantaranya yaitu karena membantu masyarakat untuk berbelanja dan menjual hasil panen, aktivitas lebih cepat, terjadi pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Karo dan sekitarnya, terbuka jalur-jalur alternatif, membuka lapangan pekerjaan baru dan memudahkan jalan menuju ke tempat wisata alam pemandian panas. Ada juga beberapa dampak negatif, diantaranya trotoar beralih fungsi menjadi tempat untuk berdagang, retribusi daerah tujuan wisata kurang dipergunakan dengan baik, pemeliharaan jalan dari simpang Doulu-Semangat Gunung tidak diperhatikan secara periodik, dan terjadi

				Kemacetan dan genangan air saat hujan lebat.
5	Roekminiati (2014)	Evaluasi Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)	metode penelitian deskriptif kualitatif	adanya perkembangan positif IPM Kecamatan Tegalsari setelah dilakukan pemekaran dibuktikan dengan adanya peningkatan IPM Kecamatan Tegalsari pertahunnya. Hambatan yang dialami untuk meningkatkan IPM Kecamatan Tegalsari antara lain karena potensi wilayah yang kurang heterogen, budaya masyarakatnya masih tradisional, dan kurang adanya pelopor pembangunan, sedangkan tantangan kedepannya adalah adanya kururan dana yang cukup untuk Kecamatan Tegalsari dan adanya rencana pemekaran Kabupaten Banyuwangi di wilayah lain.

Sumber: Mardiyono dan Prasetya (2012); Setyawati dan Suryahani (2013); Maharani (2021); Ompusunggu (2018); Roekminiati (2014)

## 2.2 Kerangka Teori.

### 2.2.1. Evaluasi Dampak Pembangunan Wilayah

#### 2.2.1.1. Teori Evaluasi

Evaluasi adalah salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik dan manajemen pembangunan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi menjadi sarana terbaik untuk melihat kembali kesesuaian antara tujuan kebijakan atau rencana pembangunan. Berhasil atau tidak: dilanjutkan, diperbaiki dan/atau dihentikan. Dunn (1998) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Lejiu, Masjaya & Irawan, 2014). Pendapat lain dari Santoso (2010) bahwa evaluasi kebijakan merupakan kelanjutan dari aktivitas monitoring kebijakan. Jika aktivitas monitoring didefinisikan sebagai aktivitas untuk menjaga agar proses kebijakan tidak melenceng dari desain yang sudah digariskan, maka aktivitas evaluasi lebih didefinisikan sebagai aktivitas untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki.

Lebih jauh Santoso (2010) mengkritisi kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan selama ini yang hanya menitikberatkan pada capaiannya atau *outputnya*. Ketika suatu perencanaan atau kebijakan publik sudah diimplementasikan, maka dianggap kebijakan itu sudah berhasil. Padahal hal paling fundamental dalam evaluasi kebijakan adalah mencermati apakah kebijakan tersebut bisa menghasilkan dampak (*impact*) yang diharapkan atau tidak oleh kelompok sasaran.

Senada dengan Santoso (2010), Ramdhani & Ramdhani (2017) menyatakan bahwa evaluasi melibatkan dialog antar *stakeholder* dan pembuat secara terus menerus untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan sekaligus menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat. Evaluasi ini menjadi penting agar kebijakan yang sudah diimplementasikan dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik.

Ramdhani & Ramdhani (2017) kemudian mengutip Model Helmut Wollman yang menguraikan kebijakan pada tiga tipe utama, yaitu: *ex-ante evaluation*, *on-going evaluation*, dan *ex-post evaluation*.

#### 1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)

Evaluasi *ex-ante* adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Secara hipotetik, tipe evaluasi *ex-ante* ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal atas perkiraan pengaruh, dampak, atau konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Tipe evaluasi *ex-ante* juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan

2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Evaluasi *on-going* yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi *on-going* secara umum dimaksudkan untuk menjamin agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, bukan dimaksudkan untuk evaluasi penilaian akhir capaian kinerja pelaksanaan kebijakan. Dengan dilakukan evaluasi *on-going*, jika terjadi penyimpangan, diharapkan akan dapat dilakukan langkah perbaikan sedini mungkin melalui sejumlah rancangan/rekomendasi, sehingga hasil akhir pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,

Esensi dari evaluasi *on-going* adalah untuk memberikan informasi yang relevan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang ingin dicapai

3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)

*Ex-post evaluation* merupakan model evaluasi klasik dari evaluasi pelaksanaan kebijakan. Evaluasi *ex-post* dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi *ex-post* adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk menganalisa tingkat pencapaian (keluaran/hasil/dampak) pelaksanaan kebijakan. Evaluasi *ex-post* digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran), ataupun manfaat (dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penyelesaian masalah)

Dunn dalam Samahita dan Herawati (2019) menyatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

1. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam

suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran

Berdasarkan kerangka teori evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi dibedakan menjadi evaluasi formatif versus sumatif dan evaluasi proses versus evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan selama kebijakan masih dalam tahap implementasi dan evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan selesai diimplementasikan. Evaluasi sumatif sering digunakan untuk membuat keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, atau dihentikan. Kemudian evaluasi proses berfokus pada cara kebijakan diimplementasikan yang bertujuan untuk menilai seberapa baik proses pelaksanaan kebijakan, apakah berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan. Sedangkan evaluasi dampak menilai sejauh mana kebijakan publik telah mempengaruhi masyarakat. Evaluasi ini tidak hanya menilai pencapaian tujuan, tetapi juga dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh kebijakan. Dampak bisa berupa perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, atau hukum di masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, maka jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi dampak yang berusaha menilai sejauhmana pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

#### **2.2.1.2. Konsep Pembangunan Wilayah**

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan sering juga dapat diartikan sebagai proses transformasi (Noor, 2013). Transformasi yang dimaksud melalui tiga tema pembangunan. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah, hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan

masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Menurut Subandi (2011) pembangunan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Pada era modernisasi saat ini, pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara atau daerah. Oleh sebab itu konsep-konsep serta definisi-definisi pembangunan dapat memunculkan teori seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Todaro (2011) pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Terdapat tujuh ide pokok pembangunan menurut Siagian (2014), diantaranya:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka waktu pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, yang dimana dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan pembangunan.
5. Pembangunan mengarah modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional.
7. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga semakin kukuh fondasinya dan menjadi negara yang sejajar dengan bangsa lain.

Pembangunan menurut Rogers dalam Harun dan Ardianto (2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sedangkan menurut Siagian (2014) pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Muta'ali (2011) menyatakan bahwa pengertian wilayah pada dasarnya bukan sekedar area dengan batas-batas tertentu, menurutnya wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (*meaningful*) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki ketertarikan di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial-ekonomi.

Pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai perkembangan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif (Rahayu & Santoso, 2014). Perkembangan wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan yang juga menjadi perwujudan dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Matondang, 2018).

Menurut Todaro (2013) pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu: 1) Ketahanan (*sustenance*) Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi); 2) Harga diri (*self esteem*) Pembangunan haruslah memanusiaikan. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu; 3) Kebebasan (*freedom for servitude*) Kebebasan bagi individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Hill (1990) dalam Wilonoyudho (2009) menyatakan bahwa perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari indikator yang bersifat statis seperti Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Seperti yang dikemukakan

BPS (2011) dalam Muta'ali (2015), dalam penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR) untuk menggambarkan rating pertumbuhan daerah, terdapat sejumlah dimensi pengukuran yang lebih lengkap, yaitu:

1. Ekonomi

Meliputi komponen: pendapatan dan urbanisasi (daya beli, pendapatan per kapita), ketenagakerjaan (pekerja formal, fulltime dengan upah diatas UMP), serta kemampuan ekonomi dan investasi (pembentukan modal, kontribusi sektor terhadap PDRB).

2. Sosial

Meliputi komponen: pendidikan (rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, penduduk yang tamat PT), kesehatan (angka harapan hidup, penduduk tidak sakit, balita imunisasi), kependudukan (pertumbuhan penduduk, rasio ketergantungan, angka kelahiran), dan sosial lainnya (keamanan, penduduk bukan korban kejahatan, penduduk tidak miskin).

3. Infrastruktur pelayanan publik

Meliputi komponen: rasio murid di SD, SMP, SMA, rasio dokter terhadap penduduk, penduduk berobat ke RS dan dokter, rasio bank, sawah irigasi dan panjang jalan aspal

4. Lingkungan hidup

Meliputi komponen: pencemaran udara, pencemaran air/tanah, akses air minum bersih, akses sanitasi layak.

5. Informasi

Meliputi komponen: akses internet, penduduk mendengarkan radio, menonton tv, rasio kantor pos, telepon selular.

Ruang lingkup pembangunan wilayah dalam suatu daerah mencakup sejumlah bidang, diantaranya sebagai berikut (Jamaludin, 2016):

1. Pembangunan di Bidang Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses upaya yang dilakukan secara sadar untuk kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu bangsa atau negara. Pembangunan ekonomi (*economic*

*development*) selalu terkait dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Adapun pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapat nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah: sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan, lapangan kerja, keahlian atau kewirausahaan, kestabilan politik, dan kebijakan pemerintah (Jamaludin, 2016).

## 2. Pembangunan di Bidang Politik

Pembangunan di bidang politik senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan ideologi pembangunan, bahkan lebih diperkuat yang tujuan dan sasarannya bahwa semua manfaat dari hasil pembangunan pada akhirnya akan diperluas pada semua sektor dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan pada bidang politik seharusnya diarahkan pada sasaran berikut: 1) Mendorong kesadaran para elite politik agar sejalan dengan anjuran konstitusi; 2) Menciptakan kecerdasan para elite politik; 3) Menciptakan pengetahuan masyarakat agar mampu menetapkan pilihan yang tepat; 4) Menciptakan pengetahuan masyarakat agar mampu menetapkan pilihan yang tepat (Jamaludin, 2016).

## 3. Pembangunan di Bidang Sosial

Pembangunan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, tetapi dinikmati sekelompok kecil orang saja (Jamaludin, 2016).

## 4. Pembangunan di Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan pendidikan oleh pemerintah

adalah usaha yang sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi generasi penerus perkembangan bangsa untuk meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat tercipta kualitas masyarakat Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing sejajar dengan bangsa lain (Jamaludin, 2016).

#### 5. Pembangunan di Bidang Keagamaan

Pembangunan di bidang keagamaan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dan dilandasi pemikiran rasional dan keyakinan secara transendental, untuk menghindari pengingkaran terhadap kebenaran keagamaan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam rangka pembangunan di bidang keagamaan agar komunitas masyarakat tertentu senantiasa dalam keadaan kedamaian dan bertoleransi adalah: 1) Pembangunan sarana keagamaan; 2) Pembangunan prasarana keagamaan; 3) Pembangunan ketaatan beragama; 4) Pembangunan toleransi beragama; dan 5) Pembangunan ketenagaan dalam keagamaan (Jamaludin, 2016).

#### 6. Pembangunan di Bidang Lingkungan

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam pada satu pihak dan sumber daya manusia pada pihak lain. Kunci utama keberhasilan pembangunan lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dasar hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jamaludin, 2016).

Untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu wilayah, maka penting mengidentifikasi indikator-indikator dampak pembangunan wilayah. Sebagaimana telah didefinisikan bahwa dampak merupakan pengaruh yang dapat timbul karena suatu akibat (baik positif atau negatif). Dampak merupakan perubahan yang terjadi di lingkungan karena adanya aktifitas manusia (Suratmo, 2009). Dampak dalam suatu proyek pembangunan di Negara-negara berkembang termasuk di daerah utamanya pada aspek sosial yang memiliki komponen-komponen sebagai indikator sosial ekonomi diantaranya (Pontoh, Mokaluk & Paat,

2021):

1. Peningkatan income masyarakat;
2. kesehatan masyarakat;
3. Pertambahan penduduk;
4. Penyerapan tenaga kerja;
5. Perkembangan struktur ekonomi yang ditandai adanya aktifitas perekonomiannya akibat proyek yang dilakukan seperti warung, restoran, transportasi, toko dan lain sebagainya.

## **2.2.2. Kualitas Hidup Masyarakat**

### **2.2.2.1. Definisi Kualitas Hidup**

Konsep kualitas hidup sangat krusial mengingat pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memperlihatkan kondisi sosial, ketimpangan, kemiskinan dan variabel ekonomi makro lainnya (World Bank, 2021; Sinaga, 2016). Kualitas hidup masyarakat suatu Negara atau wilayah dapat diukur secara komprehensif melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM ini dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990. Konsep IPM didesain untuk melampaui pendekatan yang hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita sebagai satu-satunya indikator pembangunan utama, tetapi merupakan akumulasi dari tiga aspek kunci, yakni taraf hidup atau kesejahteraan ekonomi, derajat kesehatan, dan pendidikan penduduk yang mencerminkan usaha untuk menilai dan menggambarkan pembangunan yang lebih inklusif, tidak hanya berfokus pada dimensi ekonomi, melainkan juga mencakup kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata (Fadilla & Ratnawati, 2024).

Mengutip Susnien dan Jurkauskas (dalam Abdillah, dkk, 2015) diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini tidak ada konsep kualitas hidup tunggal yang dinyatakan dan diterima secara universal, oleh sebab konsep kualitas hidup didiskusikan pada berbagai ranah keilmuan. Pada bidang sosiologi kualitas hidup diartikan sebagai pemahaman subjektif dari kepemilikan (*well-being*). Pada bidang ekonomi, kualitas hidup diartikan sebagai standar kehidupan (*standard of living*),

sedangkan pada bidang farmasi dan kedokteran, kualitas hidup adalah rasio antara waktu sehat dan sakit dengan berbagai faktor yang mempengaruhi gaya hidup sehat. Dalam penelitian ini, penulis memiliki kecenderungan untuk menggunakan definisi menurut bidang studi ekonomi pembangunan bahwa, kualitas hidup masyarakat dilihat dari standar kehidupan yang merujuk pada standar PBB dalam mengukur kinerja pembangunan melalui *Human Quality Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tingkat kesejahteraan ekonomi, derajat kesehatan dan tingkat melek huruf atau pendidikan penduduk.

Lebih lanjut Abdillah, dkk (2015) mengatakan bahwa kualitas hidup dapat dipandang dalam konteks objektif atau subjektif. Kualitas hidup dalam konteks objektif seringkali dipandang secara makro dengan menggunakan alat ukur umum dan merupakan konsensus yang disepakati oleh banyak negara di dunia. Morris dan Alpin (dalam Abdillah, dkk, 2015) misalnya mengemukakan konsep *Physical Quality of Life Index (PQLI)* atau Indeks Kualitas Hidup Fisik. Ukuran ini memberi gambaran sesuatu yang sudah dicapai dalam pembangunan dan pemerataan pembangunan. Ada tiga unsur yang tercakup dalam indeks tersebut yakni: angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka melek huruf. Dalam konteks subjektif, Kim (dalam Abdillah, dkk 2015) menjelaskan bahwa kualitas hidup merupakan aspek subjektif yang ditentukan oleh empat aspek yaitu material, komunitas, emosional, serta kesehatan dan keamanan. Mengacu pada wacana penelitian tersebut, konsep ideal terhadap kualitas hidup ditentukan oleh pendekatan objektif yang didukung oleh pendekatan subjektif. Namun demikian meskipun penilaian objektif lebih mudah dilakukan, penilaian subjektif lebih mendominasi pembahasan, mengingat ukurannya merupakan ukuran mikro pada suatu wilayah tertentu Pendekatan konsep Kim (dalam Abdillah, dkk 2015) tentang empat domain kualitas kehidupan, digunakan sebagai acuan menentukan tingkat kualitas hidup masyarakat lokal. Untuk itu maka kualitas hidup masyarakat lokal didefinisikan sebagai tingkat kepuasan terhadap aspek material, aspek sosial, aspek pribadi, dan aspek spiritual.

Salah satu pendekatan subjektif yang dikemukakan oleh WHO (2018) suatu organisasi kesehatan duni yang mendefinisikan kualitas hidup masyarakat atau

*Quality of Life* sebagai persepsi individual tentang posisi di masyarakat dalam konteks nilai dan budaya terkait adat setempat dan berhubungan dengan keinginan dan harapan yang merupakan pandangan multi dimensi, yang tidak terbatas hanya dari fisik melainkan juga dari aspek psikologis. Kualitas hidup adalah konsep yang luas yang berpengaruh pada kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kepuasan, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Land, Michalos, & Sirgy (2012) menyebutkan bahwa kualitas hidup bersifat multidimensi yang artinya lebih dari satu aspek/ dimensi yang dilihat dan dinilai yaitu meliputi status kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Sedangkan Rachmawati (2013) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terkait posisinya dalam kehidupan yang ada hubungannya dengan sistem budaya, nilai, cita-cita, penghargaan dan pandangan-pandangannya yang arah pengukuran secara multi-dimensional yang tidak hanya sebatas efek fisik dan psikologis pengobatan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan obyektif tentang kualitas hidup (*Quality of Life*) yang merujuk pada standar Bank Dunia dalam mengukur kinerja pembangunan melalui *Human Quality Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu tingkat kesejahteraan ekonomi, derajat kesehatan dan tingkat melek huruf atau pendidikan penduduk dan pendekatan subyektif tentang kualitas hidup (*Quality of Life*) yang merupakan penilaian individu mengenai posisinya dalam kehidupan dengan melihat seberapa besar kemampuannya dalam melakukan kegiatan sehari hari dan dapat dinilai secara multi-dimensional yang mencakup 4 (empat) dimensi, yaitu kesehatan fisik, psikologis, sosial dan dan kualitas lingkungan.

#### **2.2.2.2. Dimensi Kualitas Hidup**

Setidaknya ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan dimensi kualitas hidup. Pertama adalah pendekatan obyektif yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Programme (UNDP) dan Bank Dunia dalam mengukur kinerja

pembangunan melalui *Human Quality Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu : (1) Kesehatan: Umur Panjang dan Hidup Sehat yang diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) (2) Pendidikan: Pengetahuan melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan (3) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan: Standar Hidup Layak melalui indikator Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan. Sedangkan pendekatan subyektif tentang kualitas hidup (*Quality of Life*) yang merupakan penilaian individu mengenai posisinya dalam kehidupan dengan melihat seberapa besar kemampuannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan dapat dinilai secara multi-dimensional yang mencakup 4 (empat) dimensi, yaitu kesehatan fisik, psikologis, sosial dan kualitas lingkungan.

Pertama, IPM merupakan sebuah metrik yang dapat mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan dengan jumlah komponen dasar yang memengaruhi kualitas hidup. IPM digunakan untuk mengategorikan tingkat perkembangan suatu negara, apakah itu sebagai negara modern, negara masih berkembang, atau negara yang masih tertinggal. Selain itu, indeks perkembangan manusia juga berfungsi untuk menilai pengaruh sebuah kebijakan penerapan pemerintah dalam ekonomi terhadap tingkat kualitas hidup (Aziz & Husenudin, 2024). Menurut Quinlivan dan Davies (dalam Aziz & Husenudin, 2024), IPM ini merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk membandingkan harapan hidup, akses pendidikan, tingkat memahami huruf, dan tingkat standar kehidupan masyarakat di berbagai wilayah di seluruh dunia. IPM memiliki kemampuan dalam menilai peningkatan nilai rata-rata suatu wilayah negara kedalam tiga aspek utama. yaitu:

1. Kualitas kehidupan yang sejahtera dapat diukur dengan memakai Pendapatan Domestik Bruto (GDP) per kapita dalam paritas daya beli
2. Pendidikan dapat dinilai melalui tingkat memahami huruf orang dewasa, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3. Kesehatan yang baik dan tingkat harapan hidup yang panjang dapat diukur melalui harapan hidup pada awal kelahiran.

Kedua, terdapat 4 (empat) dimensi dalam pendekatan subjektif yang

menjadi parameter dalam penilaian kualitas hidup seseorang dan terdapat beberapa aspek dalam setiap domainnya. Menurut *World Health Organization Quality of Life Bref version* (WHOQoL-BREF) dalam Ekasari, Riasmini dan Hartini (2018), terdapat empat dimensi mengenai kualitas hidup yang meliputi:

1. Dimensi Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan individu akan memberikan pengalaman-pengalaman baru yang merupakan modal perkembangan ke tahap selanjutnya. Aspek dalam dimensi kesehatan fisik meliputi energi dan kelelahan, nyeri dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, mobilitas, aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada obat dan bantuan medis serta kapasitas kerja.

2. Dimensi Psikologis

Dimensi Psikologis terkait dengan keadaan mental individu. Keadaan mental mengarah pada mampu atau tidaknya individu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan sesuai dengan kemampuannya, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Aspek psikologis juga terkait dengan aspek fisik, dimana individu dapat melakukan suatu aktivitas dengan baik bila individu tersebut sehat secara mental. Aspek dalam dimensi kesehatan psikologis meliputi citra dan penampilan tubuh, perasaan negatif, perasaan positif, harga diri, berfikir, belajar, memori dan konsentrasi serta agama/spiritualitas dan keyakinan pribadi.

3. Dimensi Hubungan Sosial

Hubungan Sosial yaitu hubungan antara dua individu atau lebih dimana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya. Mengingat manusia adalah mahluk sosial maka dalam hubungan sosial ini, manusia dapat merealisasikan kehidupan serta dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya. Aspek dalam dimensi hubungan sosial meliputi hubungan pribadi, dukungan sosial dan aktivitas seksual.

4. Dimensi Lingkungan

Lingkungan yaitu tempat tinggal individu yang termasuk di dalamnya keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan. Aspek dalam dimensi hubungan dengan lingkungan meliputi sumber daya keuangan, kebebasan, keselamatan dan keamanan fisik, perawatan kesehatan dan sosial: aksesibilitas dan kualitas, lingkungan rumah, peluang untuk memperoleh informasi baru dan keterampilan, partisipasi dan peluang untuk rekreasi/waktu luang serta lingkungan fisik (polusi/kebisingan/lalu lintas/iklim).

